

**PRAKTEK PERNIKAHAN DIBAWAH USIA DINI
(ANALISA ASPEK-ASPEK HUKUM PADA
PENGADILAN AGAMA GOWA)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN
Alauddin Makassar

Oleh

RESKI UTOMO
NIM: 10500109070

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2014**

PERNYATAAN KE ASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau disusun orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Desember 2014

Penulis,

RESKI UTOMO

NIM: 10500109070

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, *Praktek Pernikahan Dibawah Usia Dini (Analisa Aspek-Aspek Hukum Pada Pengadilan Agama Gowa)*, yang disusun oleh Muh. Reski Utomo, Nim 10500109070 Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari senin, tanggal 22 Desember 2014, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum.

Samata, 22 Juni 2016 M

Ketua	: Prof. Dr. H. Ali Parman, MA	(.....)
Sekretaris	: Dr. Hamsir, M. Hum	(.....)
Munaqisy I	: Dra. Hj. Hartini Tahir, M. Hi	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Drs. H. Munir Salim, MH.	(.....)
Pembimbing II	: A. Intan Cahyani, M. Ag	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016199031003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayat Allah swt. Sehingga skripsi yang **“PRAKTEK PERNIKAHAN DI BAWAH USIA DINI (ANALISA ASPEK-ASPEK HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA GOWA)”** ini, dapat selesai untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian program studi strata satu (S1) pada Fakultas Syari’ah UIN Alauddin Makassar.

Keberadaan skripsi ini tidak langsung. Karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang sebsar-besarnya atas bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Dengan demikian, maka tak lupa penulisan dengan kerendahan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang tercinta, telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, dan tak kenal lelah serta pengorbanan apa pun sehingga penulis sampai kejenjang terakhir S1, Kepada keduanya penulis senantiasa memanjatkan do’a semoga Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa keduanya dan menentramkan kehidupan di dunia dan di akhirat.
2. Bapak Prof. Dr. H A. Qadir Gassing HT, MS, selaku Rektor bersama PR I, PR II, dan PR III, PR IV UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. Aliparman, M.A, selaku dekan bersama PD I, PD II, PD III, Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membina Fakultas dimana penulis memperoleh ilmu pengetahuan.

4. Bapak Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum, yang telah membantu penulisan dalam pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan perkuliahan dan kegiatan akademi.
5. Bapak Drs. H. Munir Salim, MH dan Ibu Andi Intan Cahyani, S.Ag. M.Ag, masing-masing dosen penulis, sekaligus sebagai pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala perpustakaan UIN Alauddin Makassar yang telah melayani dan menyediakan fasilitas dalam mengumpulkan literature yang dibutuhkan.
7. Para dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah membantu selama penulisan menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
8. Kepada saudara-saudara penulis tercinta yang telah memberikan bantuan moral maupun material selama penulis masih dalam jenjang pendidikan.



Akhirnya atas bantuan, dorongan dan jasa baik dari semua pihak penulis memohon semoga segala jenis payahnya mendapat ganjaran amal yan setimpal disisi Allah Swt. Amin. Semoga skripsi ini dalam kehadirannya dapat bermanfaat kepada almamater, Agama, Bangsa dan tanah air terkhusus lagi buat diri pribadi penulis. Dan semoga Allah Swt. Dapat memberkati kita semua. Amin.

Makassar. Desember 2014

Penulis,

RESKI UTOMO
NIIM: 10500109070



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. FOCUS PENELITIAN DAN DESKRIPSI FOCUS.....	6
D. KAJIAN PUSTAKA.....	6
E. TUJUAN DAN KEGUNAAN.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9
A. PENGERTIAN PERNIKAHAN DAN PERNIKAHAN DINI	9
B. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERNIKAHAN	15
C. DASAR-DASAR HUKUM PERNIKAHAN	18
D. SYARAT DAN RUKUN PERNIKAHAN	20
E. HIKMAH DAN TUJUAN PERNIKAHAN	21

F. BATAS UMUR IDEAL UNTUK MELAKUKAN PERNIKAHAN..	23
G. KARANGKA KONSEPTUAL.....	30
BAB III METODIOLOGI PENELITIAN	31
A. JENIS DAN LOKASI PENELITIAN.....	31
B. PENDEKATAN PENELITIAN.....	31
C. SUMBER DATA	32
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	33
E. INSTRUMEN PENELITIAN	33
F. TEKNIK PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA DATA	33
G. MENGUJI KEABSAHAN DATA	33
BAB IV PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN	34
A. FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN MASYARAKAT GOWA SULAWESI SELATAN.....	34
B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MASYARAKAT MUSLIM GOWA UNTUK MELAKSANAKAN PERNIKKAHAN DINI DI USIA MUDAH.....	40
C. PERKAWINAN DINI DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	60
D. PRAKTEK PERNIKAHAN DI KABUPATEN GOWA SEBELUM BERLAKUNYA UU NO 1 THN 1974	70
BAB V PENUTUP.....	73

A. KESIMPULAN.....	73
--------------------	----

B. SARAN-SARAN	74
----------------------	----

DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAK

Nama : Reski Utomo
NIM :10500109070
Jurusan :Ilmu Hukum
Fakultas :Syari'ah Dan Hukum
Judul :Praktek Pernikahan Di Bawah Usia Dini (Analisa Apek-Aspek Hukum Pada Pengadilan Agama Gowa)

Skripsi ini membahas tentang pernikahan dini dan upaya penanggulangannya ditinjau dari normatif Hukum Islam dengan pokok permasalahan bagaimana tinjauan normatif Hukum Islam terhadap penanggulangan terjadinya pernikahan Dini. Dari masalah pokok tersebut dirinci ke dalam beberapa sub masalah untuk mempermudah penjelasannya.

Dalam penulisan ini digunakan metode pendekatan dalam pengumpulan data. Metode pendekatan meliputi : *pertama*, pendekatan yuridis, Metode ini dipergunakan dalam menganalisa apa yang terdapat dalam perundang-undangan yang berhubungan dengan aturan pembatasan usia perkawinan, *kedua*, pendekatan syar'i, yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan antara suatu permasalahan dengan syariat islam untuk menemukan kedudukan hukumnya, metode pengumpulan data dengan cara membaca, meneliti, dan menganalisa buku-buku atau sumber - sumber lain yang membahas tentang pernikahan dini.

Dari hasil penggunaan metode-metode tersebut, penulis dapat mengemukakan intisari dari skripsi ini, bahwa pernikahan dini bila ditinjau secara syar'i, yaitu tidak ditemukan dalil yang secara tekstual mencegahnya, namun karena pertimbangan kemaslahatan terutama bagi kelangsungan sebuah rumah tangga bagi suami istri, maka diaturlah dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pernikahan dini dapat terjadi karena kawin paksa atas kehendak orang tua dan hamil di luar nikah. Penyebab yang terakhir ini, sesungguhnya menggunakan pendekatan norma Hukum Islam, Adapun solusi yang penulis tawarkan adalah memberikan pemahaman terhadap dampak pernikahan dini kepada para remaja, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam dan hukum-hukumnya serta mengaplikasikannya dalam tingkah laku sehari-hari sehingga tidak terjebak dalam perbuatan yang terlarang. Selain itu, pemahaman terhadap tujuan pernikahan juga tidak terlupakan, dengan demikian pernikahan dini dapat ditanggulangi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan hubungan manusia, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal diatur bagaimana hubungan antara manusia dengan Tuhan, sedangkan secara horizontal diatur bagaimana manusia agar mampu berinteraksi dengan sesama makhluk. Salah satu bentuk aplikasi dari hubungan horizontal tersebut adalah perkawinan.

Allah menciptakan manusia berjenis kelamin (sex) laki-laki dan perempuan, sehingga mereka menjadi berpasang-pasangan atau berjodoh-jodohan, yang disebut perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu sunnah Allah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan¹.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* bahwa pernikahan adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita atau sebaliknya. Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia.

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (cet. Ke-9, Bandung: al-ma'arif, 1994.) hlm.17

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Di samping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya, setelah perkawinan kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus sanggup memikul dan melaksanakan³.

Suami maupun isteri perlu memiliki kesiapan matang, baik fisik maupun psikis. Hal ini karena pekerjaan berat tersebut tidak mungkin terlaksana dengan persiapan yang asal-asalan dan kondisi fisik maupun psikis yang buruk. Bagi wanita misalnya, rutinitas kerja dalam rumah tangga memerlukan tenaga yang sangat besar, dari mengurus diri, rumah, mengurus dan melayani kebutuhan suami, baik lahir maupun batin, belum lagi kalau dikaruniai Tuhan keturunan, hal ini akan menambah beban isteri. Semua itu memerlukan ketahanan fisik yang prima.

Bagi laki-laki, ketahanan fisik dan mental lebih dituntut lagi seperti di sebutkan al-Qur'an, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Logikanya, laki-laki harus lebih siap dibanding wanita. Kewajiban ini di perintahkan allah dalam firmanNya;

³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, (*Hukum Perdata Islam di Indonesia*) (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No 1/1974 sampai KHI). (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.39

مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَى بَعْضِهِمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الرِّجَالِ
تَخَافُونَ وَالَّتِي اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَفِظَتْ قَنِينَتٌ فَالْصَّلَاحُ أَمْوَالِهِمْ
أَطَعْنَكُمْ فَإِنْ أَضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعَ فِي وَأَهْجُرُوهُنَّ فَعِظُوهُنَّ نُسُوزَهُنَّ
كَبِيرًا عَلَيَّا كَانَ اللَّهُ إِنَّ سَبِيلًا عَلَيْنَّ تَبْغُوا فَلَا

ARTINYA :

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Melalui ayat di atas, jika dilihat melalui pendekatan Dzhahir al-ayah dapat dipahami, bahwa laki-laki dituntut untuk mencukupi kebutuhan isteri dan anak-anaknya dari kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perlindungan dari segala ancaman⁵. Ia harus mendedikasikan segala potensi untuk memberikan kenyamanan terhadap keluarganya.

Mereka yang telah dewasa saja yang secara umum dapat melewati, sedangkan mereka yang belum dewasa, belum siap menerima beban seberat ini. Dalam keseharian peristiwa perkawinan usia dibawah umur sering kali ditemukan, terutama di dalam masyarakat pedesaan atau masyarakat berpendidikan rendah.

⁴ An-Nisa (4): ayat 34

⁵ lebih dalam berbicara tentang nafkah, menurut NJ. Aisjah Dachlan bahwa “Karena laki-laki dijadikan Tuhan lebih kuat dari wanita, kodrat alam sudah menentukan laki-laki bertubuh kuat, badan tegap dan kekar, maka sudah sepantasnya laki-laki diberi hak memimpin untuk melindungi istri dan anaknya.” Lihat NJ. Aisjah Dachlan, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Jamunu, 1969), hlm.57.

Alasan yang klise dalam perkawinan ini adalah kesulitan ekonomi, serta kebiasaan adat yang terjadi pada keluarga yang merasa malu mempunyai anak gadis yang belum menikah di usia dua belas sampai lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Biasanya perkawinan seperti ini berusia pendek karena mereka yang terlibat perkawinan tersebut memang belum siap lahir batin untuk menghadapinya.

Dalam fikih, ketentuan usia berapa sebaiknya seseorang yang dapat menikah tidak dijelaskan. Yang ada hanyalah ketentuan aqil-balig bagi pria dan wanita yang terkenal dengan istilah alaham al-bulug. Di sana ada batasan bagi wanita yaitu setelah mentruasi (haid), sedangkan batasan bagi laki-laki yaitu setelah mengalami mimpi basah. Padahal laki-laki yang sudah mengalami mimpi basah dan perempuan yang sudah mentruasi belum tentu juga mengalami kedewasaan dalam berfikir.

Undang-Undang Perkawinan dengan prinsip kematangan calon mempelai menetapkan batas usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sebagai batas minimal melangsungkan pernikahan. Dalam pasal 7 ayat (1), pada usia tersebut baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya. Di samping itu, juga dimaksudkan menekan laju reproduksi manusia, menekan laju pertumbuhan penduduk.

Dalam keadaan yang sangat memaksa, perkawinan di bawah umur tersebut dapat dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan kedua orang tua yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat (2).

Dalam perkawinan disaat sisi calon mempelai harus menunggu sampai waktu-waktu tertentu, sampai sekiranya calon mempelai dianggap mampu memikul tugas sebagai isteri atau sebagai suami, sedang di lain sisi, rangsangan dan godaan begitu sporadis tersebar di mana-mana. Oleh karena itu, haruskah pernikahan yang mesti dibatasi atau harus membiarkan pernikahan tanpa “rencana” yang matang sebagai solusi.

Fakta di lapangan (based of fact), seperti yang terjadi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan⁶ menunjukkan bahwa ditemukan pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai dengan usia di bawah batas minimal standar usia yang telah diatur dalam Undang- Undang Perkawinan.

Apakah masyarakat tidak mengerti kalau sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia calon mempelai, bukankah Undang-Undang tersebut sudah disahkan sekitar tiga puluh tahun yang lalu, atau masyarakat tersebut memang tidak mau tahu tentang usia ideal menikah. Berangkat dari fenomena tersebut, penyusun merasa penting untuk melakukan penelitian lebih serius terhadap penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur di kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah Dalam penelitian ini adalah:

⁶ tanpa menggunakan kecamatan dan kabupaten lagi

1. Bagaimana pernikahan dini di tinjau dari aspek-aspek hukum Islam dan social budaya.
2. Bagaimana penerapan hukum pelaku dan pelaksana pernikahan dini di Wilayah Gowa dan khususnya Pengadilan Agama Gowa.
3. Bagaimanakah praktek pernikahan Dini di kabupaten Gowa sebelum dan sesudah berlakunya UU NO.1 THN 1974.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.

Fokus penelitian merupakan batasan penelitian agar jelas ruang lingkupnya yang akan di teliti. Untuk itu, focus penelitiannya yaitu tentang bagaimanakah peraturan dalam ruang lingkup hukum dan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan praktek pernikahan di bawah usia dini dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Gowa Sulawesi Selatan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan judul yang penulis pilih yaitu “pernikahan dini dan upaya penanggulangannya ditinjau dari norma hukum islam sehingga untuk mendukung selesainya penulisan skripsi ini maka penulis menelaah dan mencermati beberapa buku rujukan yang ada kaitannya dengan pembahasan, sebagai bahan rujukan seperti.

Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan oleh Drs. Kemal Muhkti.

Buku ini menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum perkawinan menurut ajaran islam, serta pendapat para ahli fiqih dalam masalah

perkawinan yang dianggap penting menurut normatif hukum islam di Indonesia, Mesir, Syiria, Iraq, dan lain-lain.

Perceraian dan Penanggulangannya, oleh Drs. M Thalib. Buku ini menjelaskan serta memberikan pengertian dan pokok-pokok lainnya dalam mengarungi bahtera rumah tangga sehingga tingkat perceraian bias teratasi dan berkurang.

Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan oleh A. Rahman I Doi yang membahas tentang bagaimana hukum islam menempatkan aturan dalam perkawinan serta karakteristiknya, sehingga aturan-aturan yang sudah ditetapkan bias terlaksana dengan baik. Serta karangan A. Suhdi Muhdloi, memahami hukum perkawinan menuju keluarga bahagia. Begitu pentingnya makna dan tujuan perkawinan sehingga anjuran untuk mengetahuinya sangatlah berharga, membahas seluruh isi hukum perkawinan yang meliputi: nikah, talak cerai, dan rujuk bukan hanya ditinjau dari sisi hukum islam tetapi juga dari perundang-undangan tentang perkawinan yang ada di Indonesia (UU No. I 1991) dan masih banyak lagi buku yang lainnya menyangkut pembahasan ini.

Dari beberapa buku rujukan di atas, dalam penjelasannya belum ada pembahasan yang mengupas secara detail tentang permasalahan yang ada. Akan tetapi, terdapat beberapa titik persamaan yang menjadi inspirasi bagi penulis, sehingga penulis tertarik untuk membahas dan tetap mengacu pada pokok permasalahan yang terdapat dalam buku tersebut disamping itu pula, belum ada penulis lain yang membahasnya

E. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pernikahan Dini di tinjau dari aspek-aspek Hukum Islam dan social budaya.'
2. Untuk mengetahui penerapan hukum, pelaku dan pelaksana pernikahan Dini di Wilayah Gowa dan khususnya Pengadilan Agama Gowa.'
3. Untuk mengetahui praktek perkawinan dini di Kab.Gowa sebelum dan sesudah berlakunya UU NO.1 THN 1974.'

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Meminimalisir mencuatnya angka pernikahan di bawah umur, dengan membawa dasar pernikahan masyarakat pada perlunya pernikahan dilakukan dalam usia dewasa, sehingga pernikahan masyarakat tidak lagi berseberangan dengan Undang-Undang Perkawinan.
2. Memberikan pemahaman dan penyadaran baru kepada masyarakat akan pentingnya memahami pembatasan Undang-Undang Perkawinan terhadap usia nikah melalui pendekatan Psikologi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Pernikahan Dan Pernikahan Dini

- a. Pengertian pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-Undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian menurut pasal 26 KUHPerdatal[2]⁷.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan menurut agama Islam, pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah / kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah

⁷Subekti R., 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 8.

menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil. sedangkan

- b. pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan/pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan di sebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masuk berusia di bawah 18 tahun (masih berusia remaja).

Didalam Undang-Undang Perkawinan terdapat beberapa pasal diantaranya pada pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 2 menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (YPAN, 2008).’

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja yaitu (Nugraha, 2002):

1. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi, kehilangan kesempatan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi, interaksi dengan lingkungan teman sebaya menjadi berkurang, sempitnya dia mendapatkan kesempatan kerja, yang otomatis lebih

mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim).

2. Dampak bagi anak: akan melahirkan bayi lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi, cedera saat lahir, komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya mortalitas.
3. Pernikahan dini merupakan salah satu faktor penyebab tindakan kekerasan terhadap istri, yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
4. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
5. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
6. Rerelasi yang buruk dengan keluarga.

Walaupun begitu, dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah sebuah masalah, karena pernikahan dini sudah menjadi kebiasaan. Tetapi, dalam konsep perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari karena pernikahan tersebut. Fenomena Sosial Pernikahan Usia Anak di Indonesia. Pernikahan usia anak atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah umur merupakan salah satu fenomena sosial yang banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Di daerah perkotaan kerap kita jumpai anak-anak dibawah usia 16 tahun sudah dinikahkan. Di perdesaan, pernikahan di bawah umur (dini) angkanya jauh lebih besar lagi di bandingkan dengan daerah pedesaan. yang menampilkan kesederhanaan pola pikir masyarakatnya sehingga mengabaikan banyak aspek yang seharusnya menjadi syarat dari suatu perkawinan. Setelah

menikah seorang gadis di desa sudah harus meninggalkan semua aktivitasnya dan hanya mengurus rumah tangganya, begitu pula suaminya di tuntutan lebih memiliki tanggung jawab karena harus mencari nafkah.

Namun secara umum, perkawinan usia anak ini tidak terlepas dari beberapa faktor yang memengaruhi. Menurut Hadi Supeno, ada tiga faktor atau sinyal ini yaitu: Tradisi lama yang sudah turun temurun yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya tidak segera memperoleh jodoh, orang tua merasa malu karena anak gadisnya belum menikah.

Budaya eksploitatif terhadap anak, yang membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini. Ada yang mengeksploitasi anak atas nama ekonomi atau materi, ada yang karena gengsi atau harga diri bisa mengawinkan anaknya dengan orang yang dianggap terpandang tanpa memperdulikan apakah calon suami anaknya sudah beristri atau belum, apakah anak perempuannya sudah siap secara fisik, mental dan sosial ataukah belum. Ada yang mengeksploitasi anak karena mental hedonis, mencari kesenangan pada banyak hal termasuk poligami dengan anak-anak di bawah umur. Ada pula yang karena kelainan mental, *pedophilis*. Alasan lain bahkan mengeksploitasi anak atas nama agama, walaupun banyak tokoh agama telah tegas menyatakan bahwa perkawinan pada usia anak bukanlah ajaran agama, terutama apabila diklaim sebagai bagian dari sunah Nabi saw.

Secara hukum perkawinan usia anak dilegitimasi oleh Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini memperbolehkan

anak berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, *“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilanbelas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enambelas) tahun.”* Pasal 26 UU R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan dini, tetapi pasal ini, sebagaimana UU Perkawinan, tanpa ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Faktor ketiga ini, menarik perhatian untuk membuka lembaran sejarah pada saat perumusan Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas usia yang ditawarkan dalam RUU Perkawinan adalah usia 21 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan. Ketentuan ini mengundang reaksi keras khususnya dari kalangan muslim sendiri, karena dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan ketentuan dalam RUU tersebut merupakan respon terhadap maraknya praktik pernikahan di bawah umur yang terjadi di Indonesia dan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan pada saat itu. Akhirnya, ketentuan yang disepakati oleh parlemen adalah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pemberlakuan perundang-undangan perkawinan kurang lebih 34 tahun, ternyata belum mampu memberikan perubahan yang berarti dalam masyarakat. Beberapa daerah di Indonesia berdasarkan laporan pencapaian *Millennium Development Goal's* (MDG's) Indonesia 2007 yang diterbitkan oleh Bappenas (Badan Pengawasan Nasional) menyebutkan, bahwa Penelitian Monitoring Pendidikan oleh *Education Network for Justice* pada kabupaten Gowa, provinsi Sulawesi selatan menemukan 20,10 % informan menikah pada usia di bawah 18

tahun. Mayoritas dari mereka adalah perempuan yakni sebanyak 40,03 %, dan terkonsentrasi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Gowa (58,31 %). Angka tersebut dengan menunjukkan tingginya pernikahan di bawah usia 16 tahun di Indonesia, yaitu mencapai 20 % dari jumlah pernikahan yang ada. Bahkan di beberapa daerah persentasenya lebih besar lagi di dibandingkan dengan Kabupaten Gowa provinsi Sulawesi selatan.

Di samping itu, laporan *Into A New World: Young Women's Sexual and Reproductive Lives* yang didukung oleh *The William H Gates Foundation* tahun 1998 telah melansirkan, usia pertama kali melahirkan di Indonesia antara usia 13-18 tahun mencapai 18 % dan pernikahan di bawah usia 18 tahun mencapai 49 % pada tahun 1998. Kondisinya saat ini tidak jauh berbeda, angka pernikahan antara 13-18 tahun ini sangatlah signifikan terjadi di beberapa Kabupaten di Sulawesi Selatan tapi dalam pengembangan responden pernikahan di bawah umur ini mayoritas adalah wanita. Angka pernikahan pada usia muda bagi anak perempuan 3 kali lebih besar dibanding dengan anak laki-laki. Di Kota Gowa menurut catatan kantor Pengadilan Agama (PA) Kota Gowa angka pernikahan di bawah usia 15 tahun signifikan terjadi, hingga September 2008 tercatat 10 pernikahan yang usia pengantin perempuannya masih dibawah 15 tahun. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari 2 juta perkawinan sebanyak 34,5 % kategori pernikahan dini.

Fenomena pernikahan pada usia anak di daerah lainya tidaklah jauh berbeda mengingat fakta perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks pra-nikah sering berujung pada pernikahan dini serta kultur masyarakat Indonesia yang masih memosisikan anak perempuan sebagai warga kelas kedua dan ingin

mempercepat perkawinan dengan berbagai alasan ekonomi dan sosial. Anggapan pendidikan tinggi tidak penting bagi anak perempuan dan stigma negatif terhadap status perawan tua. Posisi tersebut dalam perspektif kesetaraan dan keadilan gender berarti telah memarginalkan pihak perempuan.

Tingginya angka pernikahan usia anak, menunjukkan bahwa pemberdayaan *law enforcement* dalam hukum perkawinan masih rendah. Apapun alasannya, masa muda adalah masa yang sangat indah untuk dilewatkan, dengan hal-hal yang positif. Masa muda adalah waktu untuk membangun emosi, kecerdasan dan fisik. Ketiganya merupakan syarat dalam menjalani kehidupan yang lebih layak pada masa depan. Fenomena tersebut menuntut perhatian semua pihak untuk memperhatikan masa depan anak sebagai generasi yang akan melanjutkan pembangunan bangsa dan negara. Haruskah direnggut kemerdekaan anak hanya karena sebuah ketakutan? Benarkah pernikahan di bawah umur satu-satunya solusi atas kekhawatiran-kekhawatiran yang ada? Pertanyaan ini dapat di jawab dengan sikap ilmiah dan bijaksana.

Perkembangan pemikiran hukum Islam dalam masalah perkawinan berkembang sangat menarik pada masa pra Undang-Undang perkawinan dan masa-masa sesudahnya. Ide perumusan Rancangan Undang-Undang Perkawinan dimulai sejak tahun 1950.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Pengertian Pernikahan

Dalam bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.

Pengertian perkawinan menurut istilah ilmu fiqh sering memakai lafaz "nikah" dan "ziwaj". Menurut bahasa, nikah dapat mengandung makna haqiqi, yaitu "dam", yang artinya menghimpit, menindih, atau berkumpul, dapat pula mengandung makna majazi, yaitu : "wala", Yang berarti bersetubuh atau 'aqad (mengadakan perjanjian pernikahan) . Menurut syara', arti nikah adalah akad yang membolehkan seorang laki- laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafaz "nikah" atau "tazwij", atau terjemahannya. Adapun "ziwa atau "tazwin bermakna sama dengan nikah.'Abd Ar-Rahman Al-Jazairi menambah pengertian nikah dengan pengertian yang musytarak atau 'aqad dan wata`⁸. Di dalam pengertian syara' terkadang lafaz nikah digunakan untuk 'aqad, terkadang digunakan untuk wata`, dan terkadang pula digunakan satu makna. Pengertian nikah yang ketiga yang merupakan pengertian fihiyyah. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa⁹. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sah atau kuat atau mitsaqan ghaliz an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹⁰. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah¹¹.

⁸ Abd ar-Rahman al-Jazairi, Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, (Beirut : Dar al Kutub al-'Amiyyah 1410 H / 1990 M) IV : 7.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Bab I Pasal 2 ayat (2) .

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 3.

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Perkawinan merupakan sesuatu yang suci, sesuatu yang dianggap luhur untuk dilakukan. Oleh karena itu, apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan dengan tujuan sementara saja seolah-olah sebagai tindakan permainan, agama Islam tidak memperkenalkannya. Perkawinan hendaknya dinilai sebagai sesuatu yang suci, yang hanya akan dilakukan oleh orang-orang dengan tujuan yang luhur dan suci¹². Hanya dengan demikian tujuan perkawinan dapat tercapai. Perkawinan erat kaitannya dengan upaya membentuk rumah tangga, yaitu unit terkecil dalam suatu masyarakat, suatu tempat di mana orang menyusun dan membina keluarga. Dengan kata lain berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami isteri melalui jenjang pernikahan, menyatukan watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing¹³. Membesarkan dan mendidik anak-anak yang akan lahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dengan keluarga besar pihak isteri, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika yang mungkin terjadi dan bersama-sama mentaati perintah agama¹⁴.

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet ke-9, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 11.

¹³ Lili Rosjidi, *Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 7.

¹⁴ Aisyah Dahlan, *Membina Rumah Tangga*, (Jakarta: Jammunu, 1969), hlm. 85.

C. Dasar-dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan merupakan perintah agama yang langsung difirmankan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an, di antaranya :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٥﴾

Artinya :

1. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

[263] Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

[264] Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Di samping itu Rasulullah SAW juga telah memberi perintah atau anjuran untuk menikah, di antaranya adalah

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عِلْمُهُ ﴿١٦﴾

Artinya :

32. dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

[1035] Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

¹⁵ An-Nisa' (4): ayat 1

¹⁶ An-Nur' (24) : ayat 32

Adapun hukum pernikahan menurut Islam, dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Wajib¹⁷. Perkawinan wajib hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, telah mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggung jawab akan kewajibannya dan khawatir apabila tidak menikah akan mudah terjerumus dalam perbuatan zina.
- b. Sunnah¹⁸. Perkawinan sunnah hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, mempunyai kemampuan untuk melakukan dan bertanggungjawab akan kewajibannya, tetapi tidak khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.
- c. Haram¹⁹. Perkawinan haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggungjawab atas kewajibannya, karena justru apabila kawin akan membawa kemadharatan.
- d. Makruh²⁰. Perkawinan menjadi makruh hukumnya bagi orang yang telah berkeinginan kuat untuk kawin, tetapi dikhawatirkan tidak atau belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan bertanggungjawab akan kewajibannya dan apabila tidak menikah tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.

¹⁷ Perkawinan yang hukumnya wajib berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

¹⁸ Perkawinan yang hukumnya sunnah berarti perkawinan itu lebih baik dilakukan daripada ditinggalkan, jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa

¹⁹ Perkawinan yang hukumnya haram berarti perkawinan itu dilarang keras dilakukan, jika dilakukan berdosa, dan jika tidak dilakukan mendapat pahala

²⁰ Perkawinan yang hukumnya makruh berarti perkawinan itu lebih baik ditinggalkan daripada dikerjakan, apabila ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilakukan berdosa

- e. Mubah²¹. Perkawinan menjadi mubah hukumnya bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan kawin maupun alasan-alasan yang mengharamkan kawin .

D. Syarat dan Rukun Pernikahan

Untuk dikatakan syahnya suatu pernikahan, adalah apabila pernikahan itu telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Menurut mazhab Syafi'I menyebutkan bahwa rukun atau unsur pernikahan ada lima mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabul. Masyarakat Muslim Indonesia termasuk masyarakat Muslim Kabupaten Gowa sudah meyakini bahwa rukun pernikahan adalah sebagaimana tersebut di atas, karena masyarakat Muslim Gowa mayoritas sudah mengikuti paham Syafi'iyah, sehingga pernikahan yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut sudah dikatakan syah menurut hukum Islam, padahal di antara ulama dan mazhab-mazhab yang lain berbeda

Pendapat mengenai rukun pernikahan itu sendiri. Adapun syarat-syarat pernikahan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bagi mempelai laki-laki harus beragama Islam, bukan banci, calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri, calon mempelai laki-laki tahu dan kenal betul pada calon istri, tidak dipaksa, tidak mempunyai istri yang haram di madu dengan calon istri .

²¹Perkawinan yang hukumnya mubah (boleh) berarti perkawinan itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak dilaksanakan, jika dilaksanakan tidak ada sanksi apa-apa, yakni tidak mendapat pahala dan tidak berdosa

- b. Bagi mempelai perempuan halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa dan lain-lain.
- c. Wali, pernikahan dapat dilangsungkan oleh wali atau pihak perempuan ataupun yang mewakili baik dari pihak mempelai laki-laki maupun dari pihak perempuan, adapun syarat wali adalah : laki-laki, Muslim, baligh, berakal atau tidak fasik.
- d. Saksi, saksi dalam suatu akad pernikahan haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: Dua orang laki-laki, baligh, berakal, melihat dan mendengar, serta mengerti (paham) akan maksud akad nikah.
- e. Ijab qabul, ijab qabul diucapkan dengan lisan, akan tetapi bagi orang bisu sah pernikahannya bisa dilakukan dengan isyarat lisan atau kepala yang bisa dimengerti. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita atau wakilnya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

E. Hikmah dan tujuan pernikahan

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa, Allah menciptakan makhluknya dalam keadaan saling berpasang-pasangan, yakni Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu juga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan lain-lain

Agar manusia hidup saling membutuhkan bantuan dan hidup gotong-royong satu sama lain, seperti yang yang lemah mendapat bantuan dari orang yang kuat, dan orang yang miskin mendapat bantuan dari orang yang lebih kaya dan lain sebagainya. Seperti dalam suatu ikatan pernikahan, dimana kalau dilihat secara jasmaniah seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan seorang laki-laki,

sehingga ia mendapat perlindungan dari suami baik lahir maupun batin, dengan diciptkannya manusia yang saling berpasang-pasangan dan saling tolong-menolong akan tercipta suatu kumpulan manusia yang akan diikat oleh tali pernikahan yang sah²².

Dalam ajaran Islam pernikahan mengandung hikmah yang tinggi dan dalam, diantaranya:

- a. Membangun rumah tangga bahagia, damai dan teratur, tidak gampang rusak dan putus, akan tetapi terikat dengan kokoh dan kuat. Bila akad nikah dilangsungkan, berarti kedua belah mempelai sudah berjanji akan sehidup semati, akan hidup setia, sama susah sama gembira
- b. Membangun keluarga yang sah, sehingga setiap keluarga kenal akan ahli familinya, anak kenal terhadap bapaknya dan bapak kenal terhadap anaknya. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap- tiap keluarga dan tidak menjadi campur aduk dan diragukan lagi tentang asal-usulnya.

Pernikahan dapat menyembuhkan penyakit jiwa, menimbulkan gairah kerja dan rasa bertanggung jawab, menghubungkan tali silaturahmi dan persaudaraan serta menimbulkan keberanian keuletan dan kesabaran dan lain sebagainya. Pada dasarnya tujuan pernikahan adalah tergantung pada diri individu masing-masing yang akan melakukan pernikahan, akan tetapi ada tujuan yang memang diinginkan oleh setiap orang yang melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin dan juga menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Namun tujuan pernikahan secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

²²Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1996).

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.
2. Untuk membentengi akhlak yang luhur
3. Mengikuti Sunnah Nabi dan Menjalankan perintah Allah

F. Batas umur yang ideal untuk melakukan pernikahan.

Sebenarnya, dalam fikih atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan, namun Jumhur atau mayoritas Ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak-anaknya pada usia berapapun asalkan sudah baligh (bisa membedakan sesuatu) dan mampu. baik itu mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin dan lain-lain. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa Ulama memakruhkan praktek karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktek pernikahan di usia muda. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik pernikahan di usia muda. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid bagi perempuan. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan).

Dan juga syariat Islam menghendaki orang yang hendak menikah termasuk orang yang hendak menikah di usia muda adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah, karena apabila tidak siap maka

²³ Aisjah Dachlan. Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga.

akan merusak nilai sak'ral dari pernikahan tersebut yang kemungkinan besar akan berujung pada perceraian, persis seperti harus pahamnya apa itu shalat bagi orang yang melakukan ibadah shalat, haji bagi yang menunaikan ibadah haji, transaksi dagang bagi pebisnis dan lain-lain.

Dengan tidak ditetapkannya usia tertentu dalam masalah pernikahan dalam fikih maupun hukum Islam sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat manusia untuk dapat menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga dan kultur atau kebiasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat setempat, yang jelas kematangan jasmani dan rohani kedua belah pihak menjadi prioritas utama dalam Agama.

Akan tetapi kalau melihat konteks Indonesia, bahwa di Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur penetapan usia nikah. Undang-Undang ini merupakan hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih setempat yaitu disebut sebagai Ijtihad Jama'i, yakni ijtihad yang dilakukan bersama-sama oleh Ulama pada suatu tempat dan pada suatu masa, dimana dalam Undang- Undang pernikahan nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan untuk perempuan adalah umur 16 tahun, sedangkan bagi laki- laki telah berumur 19 tahun²⁴. Lalu juga ada pasal lain yang menyebutkan bahwa pernikahan di bawah usia 21 tahun hanya bisa dilangsungkan dengan persyaratan tambahan yakni harus meminta dispensasi kepada Pengadilan.

²⁴Departemen Agama. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya : Arkola), hlm. 8.

Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Aturan mengenai pernikahan di usia muda, juga ditegaskan kembali dalam PP No 9 tahun 75 dan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Aturan tentang pernikahan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di Negara Islam lainnya juga mengatur tentang masalah pernikahan, seperti di Suriah hampir sama dengan UU pernikahan di Indonesia, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun. Namun bila kita merujuk pada pendapatnya Muhammad Fauzil Adzim dalam tulisannya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”, ia mengatakan bahwa seharusnya seseorang menikah yaitu apabila sudah gelisah pada malam-malam yang sepi sendirian, inilah saat yang tepat untuk menikah, Jika dalam keadaan sudah mulai tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya melangsungkan suatu ikatan pernikahan dalam artian hidup berdua²⁵.

Selain itu menurut Moh Fauzil Adhim mengatakan, menikah di usia muda adalah merupakan solusi tepat untuk perbaikan moral dan akhlak pemuda maupun pemudi Muslim di tengah tengah arus globalisasi dan perang budaya, media massa dan hiburan khususnya audio visual atau penayangan lainnya yang mengarah pada gaya hidup serba boleh (ibahiyyah). Ada kebutuhan- kebutuhan psikologis yang hanya bisa dipenuhi dengan menikah, pikiran lebih jernih dan

²⁵ Muhammad Fauzil Adzim.cit., hlm. 39 .

hatipun lebih bersih. Namun ada sebagian orang mengatakan bahwa kematangan merupakan hal yang terpenting dalam pernikahan, baik itu kematangan psikologis atau kematangan usia suami atau istri. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk Aturan tentang pernikahan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia saja, namun di Negara Islam lainnya juga mengatur tentang masalah pernikahan, seperti di Suriah hampir sama dengan UU pernikahan di Indonesia, yang menjelaskan batas usia pernikahan untuk pria adalah jika telah mencapai 18 tahun dan untuk perempuannya jika sudah berusia 16 tahun. Namun bila kita merujuk pada pendapatnya Muhammad Fauzil Adzim dalam tulisannya yang berjudul “Indahnya Pernikahan Dini”, ia mengatakan bahwa seharusnya seseorang menikah yaitu apabila sudah gelisah pada malam-malam yang sepi sendirian, inilah saat yang tepat untuk menikah, Jika dalam keadaan sudah mulai tidak tenang saat sendirian, itulah saatnya melangsungkan suatu ikatan pernikahan dalam artian hidup berdua.

Menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Seringkali karena secara psikologis kondisi seseorang belum siap, membuat pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai kondisi pasca nikah. Mereka yang menikah terlalu muda secara psikologis belum matang dan ini akan berpengaruh pada motivasinya dalam mempertahankan biduk rumah tangga. Namun usia tidak identik dengan kematangan seseorang karena bisa saja orang yang sudah cukup umur tetap kurang memperlihatkan kematangan, dan bahkan yang usianya yang masih terlalu muda bias menciptakan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Di samping itu juga, kematangan fisik perlu diperhatikan

dalam sebuah pernikahan menurut Islam, ada beberapa hal yang menjadi persyaratan mutlak, yang berkaitan dengan fisik. Antara lain :

- a. Seorang laki-laki atau wanita yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik karena salah satu sebab perceraian yang diperbolehkan dalam Islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik.
- b. Usia kita juga harus menyadari, bahwa secara fisik, kita benar- benar sudah siap menikah. Itulah kenapa sebabnya seorang wanita dianjurkan untuk tidak menikah dalam usia yang masih dini. Banyak kasus yang terjadi, dimana anak-anak yang baru keluar dari sekolah dasar (usia sekitar 12-13 tahun) langsung di nikahkan. Di Barat, ada survey yang membuktikan, bahwa orang-orang yang melakukan hubungan seksual terlalu muda, pada umumnya di atas Selain itu menurut Moh Fauzil adhim mengatakan, menikah di usia muda adalah merupakan solusi tepat untuk perbaikan moral dan akhlak pemuda maupun pemudi Muslim di tengah tengah arus globalisasi dan perang budaya, media massa dan hiburan khususnya audio visual atau penayangan lainnya yang mengarah pada gaya hidup serba boleh (ibahiyyah). Ada kebutuhan- kebutuhan psikologis yang hanya bisa dipenuhi dengan menikah, pikiran lebih jernih dan hatipun lebih bersih.

Namun ada sebagian orang mengatakan bahwa kematangan merupakan hal yang terpenting dalam pernikahan, baik itu kematangan psikologis atau kematangan usia suami atau istri. Kematangan psikologis yang dimaksud adalah kematangan atau kesiapan tertentu secara psikis, untuk menghadapi berbagai

tantangan yang akan dihadapi selama hidup berumah tangga. Seringkali karena secara psikologis kondisi seseorang belum siap, membuat pasangan suami istri tidak siap dengan berbagai kondisi pasca nikah. Mereka yang menikah terlalu muda secara psikologis belum matang dan ini akan berpengaruh pada motivasinya dalam mempertahankan biduk rumah tangga. Namun usia tidak identik dengan kematangan seseorang karena bisa saja orang yang sudah cukup umur tetap kurang memperlihatkan kematangan, dan bahkan yang usianya yang masih terlalu muda bias menciptakan rumah tangga bahagia dan sejahtera. Di samping itu juga, kematangan fisik perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan menurut Islam, ada beberapa hal yang menjadi persyaratan mutlak, yang berkaitan dengan fisik. Antara lain :

- a. Seorang laki-laki atau wanita yang akan menikah harus yakin bahwa alat-alat reproduksinya berfungsi dengan baik karena salah satu sebab perceraian yang diperbolehkan dalam Islam adalah karena alat reproduksi pasangannya tidak berfungsi dengan baik.
- b. Usia kita juga harus menyadari, bahwa secara fisik, kita benar-benar sudah siap menikah. Itulah kenapa sebabnya seorang wanita dianjurkan untuk tidak menikah dalam usia yang masih dini. Banyak kasus yang terjadi, dimana anak-anak yang baru keluar dari sekolah dasar (usia sekitar 12-13 tahun) langsung di nikahkan. Di Barat, ada survey yang membuktikan, bahwa orang-orang yang melakukan hubungan seksual terlalu muda, pada umumnya di atas usia tiga puluh tahunan akan mengalami hambatan-hambatan fisik. Meskipun sekali lagi, tidak ada kriteria tertentu kapan seseorang menjadi matang secara fisik. Ada kasus-

kasus tertentu, seperti halnya orang-orang tua zaman dulu, banyak yang tetap sehat dan memiliki keluarga besar, meskipun menikah dalam usia yang masih sangat muda.

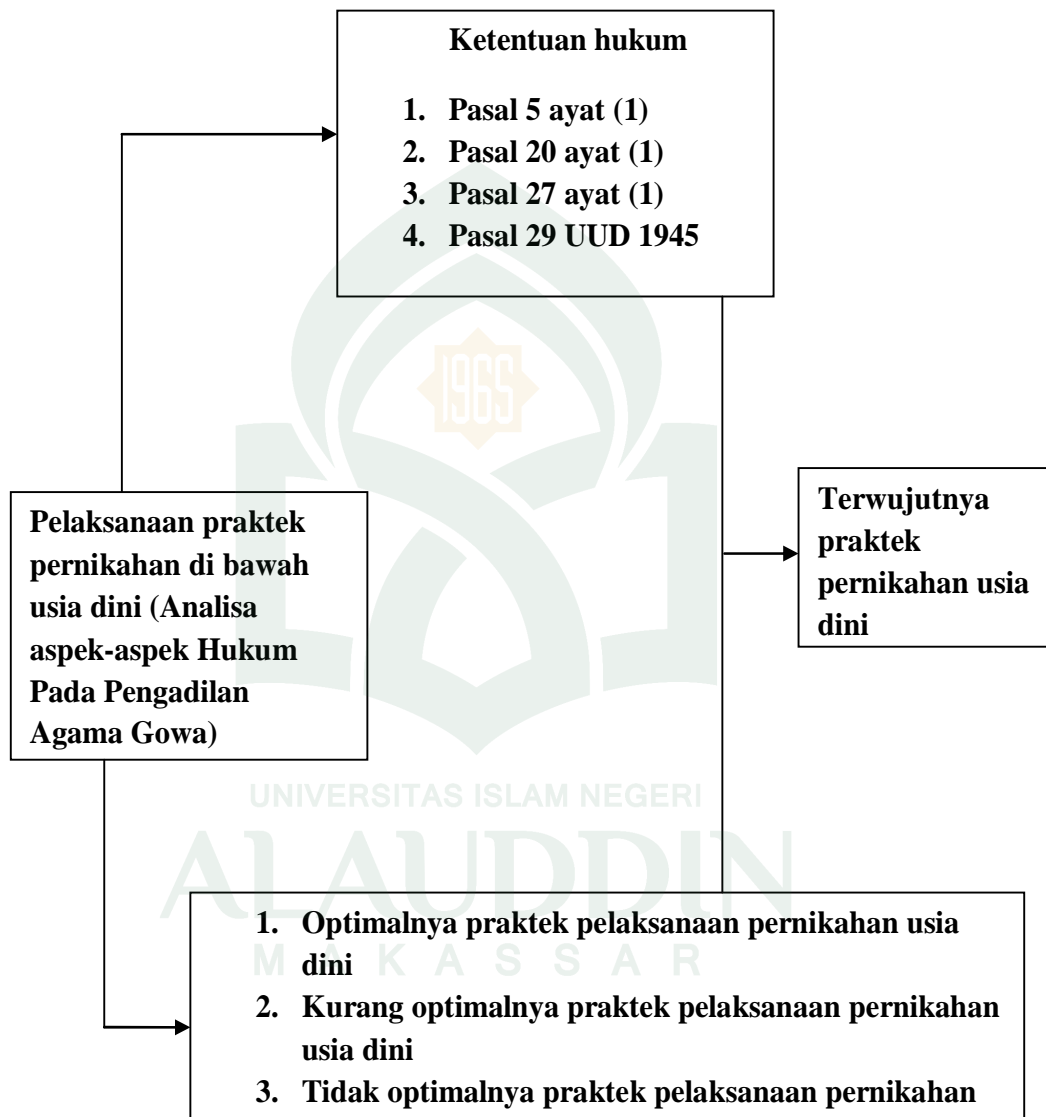
- c. Kesehatan, sebelum menikah, usahakan mengetahui kondisi fisik dan kesehatan calon pasangan masing-masing. Kalau bisa, ketahui juga kesehatan keluarga calon pasangan kita itu, karena biasanya ada penyakit tertentu yang merupakan penyakit keturunan.

“Penetapan usia yang dianggap layak untuk menikah seharusnya diserahkan kepada orang tua anak itu masing-masing. Karena orang tua adalah satu-satunya orang yang dikaruniai Allah Sang Pencipta naluri untuk mencintai dan melindungi anak, dan lebih mengetahui perkembangan anak tersebut, apakah anak itu sudah dewasa dan layak untuk menikah atau belum, karena ia sudah hidup dalam satu rumah dan juga ia tau pasti tentang perkembangan anaknya, dan orang tua juga yang paling menginginkan kebaikan di kemudian hari bagi anak anaknya.

Oleh karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan sedini mungkin maka secara tidak langsung Islam sudah menjaga tingkah laku pemuda dari pergaulan bebas. Islam juga melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejolak kebutuhan naluri manusia yang semestinya seksual yang dilarang oleh ajaran Agama, Islam juga mengarahkan pemuasan naluri tersebut melalui jalan yang alami dan sah. Agama Islam tidak mau melihat pengikutnya selalu bergelimang dosa dan maksiat yang disebabkan oleh pergaulan bebas, sehingga Islam sangat menganjurkan tentang adanya pernikahan, yang tujuannya adalah untuk menjaga kedua pasangan pemuda dan pemudi dari keterperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrem, yang akan memunculkan

berbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, di antaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat

G. Kerangka Konseptual



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan focus kajian pendekatan yuridis-empiris. Yang di maksud dengan pendekatan yuridis, adalah suatu cara yang di gunakan dalam suatu penelitian yang mempergunakan asas-asas serta peraturan perundang-undangan guna meninjau, melihat, serta menganalisis permasalahan, sedangkan metode pendekatan empiris merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.

Sehingga yang di maksud dengan yuridis-empiris, adalah suatu penelitian yang tidak hanya menekankan pada kenyataan pelaksanaan hukum saja, tetapi juga menekankan pada kenyataan hukum dalam praktek yang di jalankan oleh Pengadilan.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Pengadilan Agama Gowa dengan pertimbangan bahwa dapat memberikan data tentang pelaksanaan praktek pernikahan di bawah usia dini. dalam perkara perdata pada Pengadilan Agama Gowa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang di gunakan oleh penulisan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktriner, juga di sebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi document. Disebut

penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau di tujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain, penelitian ini menggunakan data sekunder dari buku-buku/perpustakaan.

Pendekatan penelitian lain,yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Populasi

Yakni keseluruhan komunitas hukum yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gowa mengingat jumlahnya terlalu besar dan nyata tidak efektif, sehingga perlu di bijaksanai dengan penarikan beberapa informan tertentu agar supaya yang terpilih sudah di anggap mewakii informan lain.

2. Sampel

Penelitian akan menggunakan sampel untuk mencari data seputar asus mengenai pernikahan di bawah usia dini.penelitian ini yang akan di jadikan informan terdiri dari Hakim,Panitera.pada Pengadilan Agama Gowa serta pihak yang melaksanakan perkawinan dini yang perkaranya berkaitan dengan penelitian dini.

C. Sumber Data.

Adapun jenis dan sumber data yang di gunakan oleh penulis sebagai berikut:

a. Data primer

Data yang di peroleh dengan menggunakan observsi langsung dan melalui wawancara dengan pegawai Pengadilan Agama Gowa.

b. Data sekunder

Data yang di peroleh dari buku-buku dan sumber bahan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang di peroleh maka di lakukan teknik wawancara dan interview.

E. Instrument Penelitian

Untuk mendapatkan data yang di perlukan dalam menyelesaikan proposal ini, maka penulis melakukan teknik wawancara dengan melakukan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, serta peneliti juga mempelajari literature yang berhubungan dengan meteri pembahasan seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan sita jaminan dan perkara perdata, dan kitab Undang-Undang hukum perdata

F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data.

Data yang berhasil di kumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan di analisis secara kualitatif yaitu data di lakukan dengan menelaah seluruh data dari berbagai sumber yang ada seperti wawancara dan observasi.

G. Menguji Keabsahan Data

Dalam menguji data dn materi yang di sajikan, di pergunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif yang pada umumnya di gunakan dalam menguraikan, mengutip atau peraturan perundang-undangan dan uraian umum.
2. Komperatif yang pada umumnya di gunakan dalam membandingkan perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat menimbulkan ketidak sepahaman.
3. Deduktif berpodoman pada peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: Karya Toha Putra, 1996.

Ridho, Muhammad Rasyid, Tafsir al-Manar, Mesir: al-Manar, 1325 H, IV.

Shihab, Quraish, Wawasan al-Qur'an: Tafsir al-Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Ummat, Bandung: Mizan, 1996.

B. Kelompok Hadist

Daud, Abu, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Fikr, 1994 Tirmidzy, Abu Isa Muhammad Ibnu Isa, Sunan at-Tirmidzy, Beirut: Dar al-Fikr, tt. VI.

Kelompok Fikih dan Ushul Fikih Abyan, Amir, Fiqh Untuk Madrasah Tsanawiyah III, Semarang: Thoha Putra, 1996.

Alfida, Raini, Perkawinan Remaja: Gagasan Dr. Sarlito W. Sarwono dan Tanggapan, Jakarta: Sinar Harapan, 1984.

Anwar, Rusydan dkk., Ushul al-Fiqh Li al-Madrasah ats-Tsanawiyah.

Mohammad Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.

Hakim, Rahmat, Hukum Perkawinan Islam Untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Jaziri, Abd al-Rahman al, al-Fiqh 'ala Madzahib al-Araba'ah, Mesir: Maktabah at-Tijariah, 1979.

Ramulyo, Mohd. Idris, Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Sabiq, Sayid, Fiqh al-Sunnah, alih bahasa Moh. Thalib, cet. ke-9, Bandung: al-Ma'arif, 1994, VI. Saleh, K. Wanjtik, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978.

Summa, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yunus, Mahmud, Hukum Perkawinan Dalam Islam, cet. ke-15, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996.

Zuhaili, Wahbah al, al-Fiqh al-Islami wa Adillatul, cet. ke-3, Beirut: Dar al-Fikr VII.

C. Kelompok Hukum dan Ilmu Hukum

Abdurahman, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Jakarta: Akademika Presindo, tt.

Ramulyo, Idris, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Ind. Hill co., 1984.

Kansil, C.S.T., Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU.

Aulawi, A. Wasit, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: pragnya Paramita, 1982.

D. Kelompok Lain

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, c 11 Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Barry, M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola, 1994.

Dachlan, NJ. Aisjah, Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Jamunu, 1969.

Daradjat, Zakiah, Ilmu Djiwa Agama, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

Ghifari Abu , Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern, cet. ke-4, Bandung: Mujahid, 2003.

Halim, Abdul, “Menuju Keluarga Bahagia”, Majalah Perkawinan dan Keluarga, Juli, 2000.

Johnson, Doyle Paul, Teori Sosiologi Klasik dan Modern, alih bahasa Robert M. Z. Lawang, Jakarta: PT. Gramedia, 1986.

Kadir, Abdul Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.

Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi, Jakarta: UI Press, 1987.

Maulany, R.F. (ed.), Pencegahan Ibu Hamil, Jakarta: Binarupa Aksara. 1994.

Munafi’ah, Siti, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Konsep Imam asy-Syafi’i dan Undang-Undang No. 1/1974, ”Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.

Munawwir, Ahmad Warson, al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, , cet. ke- 14 Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, cet. ke-2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Zulkifli L., Psikologi Perkembangan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.

BAB IV

PERNIKAHAN DINI DI KALANGAN

MASYARAKAT GOWA PROVINSI SULAWESI SELATAN

A. Fenomena pernikahan Dini di kalangan masyarakat Gowa Sulawesi Selatan.

Fenomena Pernikahan dini yang Terjadi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan fenomena atau tradisi di kalangan masyarakat Madura khususnya di daerah pedesaan, pegunungan, pantai, dan lain sebagainya, termasuk juga di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

Salah satu kebiasaan dalam masyarakat Gowa pada umumnya di masa silam, yaitu menjodohkan anak-anaknya di saat usia anak-anak, bahkan ada seorang anak sudah dijodohkan saat masih berada dalam kandungan.

Seperti yang telah dicontohkan oleh H. Moh Fatah, sebelum istrinya melahirkan, dia berbicara dengan Sunarto salah satu teman akrabnya waktu kecil, kemudian H. Moh Fatah mengatakan :

“Jika seumpamanya istriku lahir seorang anak laki-laki dan anak yang istri kandung nanti lahir perempuan, maukah nanti anak kita dijodohkan”.

Sebuah akad yang dilakukan sebelum sang anak dilahirkan, dan jika benar jenis kelamin di antara keduanya berbeda, maka perjodohan itu akan dilangsungkan, akad semacam itu masih melekat dan masih ada sampai sekarang.

Sehingga tidak sedikit pernikahan yang dilangsungkan pada usia muda di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, karena demi menjaga image dan hubungan kekeluargaan

yang telah dijalani sejak kecil oleh orang tua tersebut.

Karena apabila perjodohan tersebut tidak sampai pada jenjang pernikahan, maka sedikit

banyak akan terjadi kesenjangan sosial yang dapat ditimbulkan.

Pernikahan usia dini, memiliki catatan sejarah yang cukup beragam di Negeri ini.

Hampir di setiap daerah di Indonesia memiliki kisah mengenai pernikahan di usia dini, dengan tata cara yang berbeda pula.

Jika pada saat ini banyak pernikahan di usia dini dilaksanakan karena mengalami kecelakaan

seksual sebelum pernikahan. Namun di masa silam, perjodohan dan pernikahan di usia belia dan dipilihkan oleh orang tua, adakalanya karena mereka ingin mengikat tali kekeluargaan antara kerabat supaya mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh seperti yang telah dicontohkan di atas. Pernikahan di usia dini bisa juga dilakukan karena hutang budi terhadap suatu keluarga, akan tetapi pernikahan seperti itu sudah tidak lagi dilakukan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Atau juga antara kedua orang tua sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing, untuk meneruskan keturunan yang baik mereka menjodohkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunannya, Bibit, bebet, dan bobotnya.

Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih mempraktekkan pernikahan di usia muda, dan bahkan di desa tersebut dalam setahun terakhir kurang lebih ada sebelas pernikahan yang

mayoritas pernikahan tersebut masih dikatakan belum dewasa karena masih belum sampai pada waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang pernikahan. Dengan melihat daftar tabel tersebut di atas jelas sekali bahwa pernikahan di usia muda yang terjadi di Desa Bajur tersebut sangat tinggi sekali dibanding pernikahan pada usia normal yaitu di atas usia 16 dan 19 Tahun.

“Pada Bulan September 2008 Tahun lalu, di kampung ini ada seorang anak perempuan yang baru duduk di kelas 6 SD sudah dinikahkan oleh orang tuanya karena berbagai alasan yang dilontarkan oleh orang tua tersebut.

Tidak hanya perempuan saja yang menikah di usia muda bahkan laki-laki pun melaksanakan pernikahan di usia muda”.

Memang kalau melihat fenomena yang terjadi di berbagai daerah bahwa pernikahan di usia muda akan berakibat terjadinya perceraian atau budaya kawin ceraipun menjadi hal biasa dan lumrah, Akan tetapi hal demikian bisa dikatakan jarang sekali terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

“Walaupun mayoritas masyarakatnya menikah di usia muda, bahkan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang bahagia, sakinah, mawaddah dan warohmah, karena pernikahan tersebut dibarengi dengan niat yang tulus dan sungguh-sungguh, sehingga di ridhai oleh Allah”.

Pernikahan di usia muda yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Sulawesi Selatan khususnya di lingkungan masyarakat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam pernikahan di usia muda tersebut mengandung dampak negatif dan dampak positif yang ditimbulkan dalam pernikahan di usia muda. Sehingga ia berasumsi bahwa pernikahan di usia muda harus segera dilaksanakan karena kalau melihat kehidupan sekarang ini yang serba glamor menuntut seseorang untuk segera menikah, karena banyaknya budaya luar yang sudah masuk ke dalam kehidupan sekarang ini, baik itu melalui televisi, VCD, internet dan lain-lain.

Itulah sepenggal realitas sosial yang dihadapi masyarakat saat ini. Dorongan seksual remaja yang tinggi karena didorong oleh lingkungan yang mulai permisif dan nyaris tanpa batas.

Pada akhirnya, secara fisik anak bisa lebih cepat matang dan dewasa, namun psikis, ekonomi, Agama, sosial, maupun bentuk kemandirian lainnya belum tentu mampu membangun komunitas baru bernama keluarga.

Namun dalam kehidupan yang terjadi di lingkungan perkotaan yang sudah mengenyam pendidikan, ada orang tua sekarang lebih memilih menikahkan putrinya di usia yang pantas untuk menikah yakni di atas umur 16 tahun bagi perempuan dan di atas umur 19 tahun bagi laki-laki, padahal kita tahu bahwa pergaulan remaja sekarang sudah berada di ambang batas yang mengkhawatirkan.

Namun kita harus jeli melihat dampak yang diakibatkan oleh menunda-nunda pernikahan, sehingga tidak heran apabila kasus aborsi, merebaknya klub-klub malam dan tempat-tempat umum yang dipenuhi sepasang remaja bukan suami istri menjadi pembenar.

Tapi mengapa para orang tua lebih merestui anaknya bergelimang maksiat dari pada menghalalkan mereka dalam satu ikatan pernikahan. Lebih dari itu, sungguh

disayangkan Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama Islam memiliki seperangkat undang-undang pernikahan yang disusun untuk menghentikan pernikahan di usia muda tersebut, bahkan menjatuhkan hukuman bagi kedua orang tua perempuan, jika menikahkan anaknya di usia kurang dari 16 tahun, mereka lupa fitrah manusia menuntut kita untuk mengamalkan perintah Allah tersebut.

Pernikahan di usia muda yang terjadi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pernikahan yang hanya memenuhi syarat pernikahan menurut hukum Islam saja, karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil sehingga pernikahan yang terjadi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan

bisa dikatakan pernikahan sirri yaitu pernikahan yang telah memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih yakni hukum Islam, namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan seperti itu dipandang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap istri dan anak yang dilahirkannya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah ataupun hak waris

Jadi pernikahan itu harus diketahui oleh pihak KUA setempat : “Apabila dalam sebuah keluarga ingin melangsungkan suatu ikatan pernikahan, maka sepuluh hari sebelum pernikahan dilaksanakan, keluarga ataupun wali yang mewakili harus melapor pada pihak KUA bahwa dalam keluarganya akan melaksanakan suatu ikatan pernikahan, dan pihak KUA akan mengurus dan akan memberikan selebaran pengumuman yang ditempel di kantor urusan Agama dan di khalayak

ramai agar semua orang tahu bahwa pada hari yang telah disebutkan dalam undangan akan dilaksanakan suatu ikatan pernikahan”.

Namun kenyataan di lapangan tidak demikian masyarakat Gowa enggan untuk melaporkan pernikahannya kepada KUA setempat : “Masyarakat muslim Madura khususnya Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan enggan untuk melaporkan pada pihak KUA, karena menurut sebagian masyarakat Gowa untuk mengurus surat nikah tersebut dirasa terlalu merepotkan, dan ditambah lagi dengan biaya yang terlalu mahal dan memberatkannya, karena di sini untuk mengurus surat nikah tersebut harus mengeluarkan uang sebesar ± Rp. 176.000 semua ini bagi masyarakat disini masih terlalu memberatkan, sehingga masyarakat enggan untuk mengurus surat nikah tersebut”.

Dan hal itu wajar sekali apabila melihat keadaan perekonomian yang ada di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan tersebut, karena mayoritas penghasilan masyarakat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja, yang terkadang penghasilan setiap Bulannya tidak menentu, karena masyarakat di sana tidak mempunyai pekerjaan tetap. Perlu diketahui bahwa nikah sirri yang terjadi di kalangan masyarakat muslim Madura khususnya di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan yaitu ada dua macam yaitu : Pertama Pernikahan yang dilakukan tanpa wali, Kedua Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhi syarat syarat lainnya tetapi tidak dicatat di KUA setempat. Untuk pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali dari pihak wanita, maka pernikahan seperti ini adalah batal dan tidak sah” Begitu juga di katakan oleh Muhammad Anwar Umar, S.Ag “Ia

mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan pernikahan di usia muda sekaligus pernikahan yang terjadi tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang yakni pernikahan sirri itu sendiri”.

Hal tersebut dibenarkan oleh kebanyakan para tokoh setempat bahwa “Pernikahan yang terjadi di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pernikahan yang terjadi di Desa tersebut merupakan pernikahan di bawah tangan, apalagi yang menikah di usia muda, yang menikah di usia tua pun jarang sekali untuk dicatat di pihak yang berwenang, karena keterbatasan biaya.

Akan tetapi apabila sudah mempunyai biaya untuk mengurus semua biaya administrasi yang ada di KUA, maka tidak menutup kemungkinan masyarakat itu akan mengurus surat-surat pernikahan tersebut termasuk yang menikah di usia muda”.

Dengan melihat keterangan tersebut di atas, tradisi pernikahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim Desa Gowa merupakan pernikahan di usia muda yang juga bisa dikatakan pernikahan sirri yaitu pernikahan di bawah tangan pihak KUA.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim Gowa Untuk Melaksanakan Pernikahan di Usia Muda.

Kadang-kadang kita menjumpai pola perilaku masyarakat yang dianggap kurang serasi dengan tujuan pembangunan masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai contoh umpamanya, masih dijumpainya

sekelompok warga masyarakat di daerah pedesaan tertentu seperti Desa Gowa yang ada di Sulawesi Selatan yang masih memegang erat tradisi menikahkan anaknya yang masih di bawah umur 15 tahun.

Selintas tampaknya tradisi tersebut tidak terlalu menyimpang dari ajaran mereka yang ia anut, karena pemahaman masyarakat Gowa memaknai dewasa dengan akil-baligh, bagi kelompok masyarakat Muslim Gowa seringkali tidak semata-mata hanya dilihat dari segi usianya.

Bahkan terkadang masyarakat di Desa tersebut terkesan masih agak kurang peduli dengan usia anak-anaknya.

Batas dewasa akil-baligh dalam pengertian mereka seringkali diukur oleh penampilan fisik mereka, apabila dilihat bentuk tubuh yang yang besar dan bisa membantu keluarga dalam masalah pekerjaan, maka mereka anggap sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan. Biasanya di kalangan masyarakat Muslim di Gowa tersebut ketika terjadi pernikahan di usia muda tidak langsung di catat di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dalam masyarakat Desa Gowa pernikahan seperti itu banyak dikenal dengan istilah kawin sirri. Namun pernikahan semacam itu sudah dianggap sah menurut hukum Islam, akan tetapi belum dianggap sah menurut undang-undang, karena yang dianggap sah suatu pernikahan dalam undang-undang pernikahan adalah yang sah menurut Agama dan sah menurut undang-undang dan di catat di KUA. Akan tetapi ketika pasangan suami istri yang menikah di usia muda tersebut sudah dewasa dan memenuhi kriteria umur yang telah ditentukan oleh undang-undang pernikahan, yakni sudah berumur 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki akan

dilakukan lagi penyempurnaan akad nikah yang kemudian akan diajukan kepada pihak yang berwajib yaitu KUA, agar pernikahan tersebut sah menurut undang-undang pernikahan di samping sah menurut hukum Islam.

Untuk mengubah pola perilaku masyarakat pedesaan seperti itu memang tidak mudah, akan tetapi bukan berarti tidak harus diupayakan penanganannya.

Perangkat kaidah hukum sebagai alat (sarana) kiranya dapat menjadi salah satu penunjang metode perubahan perilaku hukum masyarakat tersebut.

Antara lain dilakukan melalui penyuluhan hukum yang frekuensi serta metode pendekatannya disesuaikan dengan tingkat penalaran individu anggota kelompoknya.

Tradisi para warga Desa Gowa yang mayoritas memiliki pekerjaan sebagai petani untuk menikahkan anak-anak gadis mereka ketika masih di bawah umur memang patut mendapat perhatian untuk dijadikan sasaran perbaikan.

Hal tersebut dipandang penting mengingat dari masalah tersebut sesungguhnya terkait berbagai aspek.

Umpamanya : aspek kependudukan (KB) dan lingkungan hidup, aspek permukiman serta sanitasi lingkungan, aspek tersedianya lapangan kerja bagi generasi baru, dan yang tidak kalah pentingnya adalah aspek kepatuhan dan ketaatan warga masyarakat akan berbagai aturan hukum yang memengaruhi pola perilaku mereka sehari-hari.

Baik peraturan itu berasal dari penguasa maupun yang berasal dari adat kebiasaan yang turun temurun di dalam lingkungannya.

Upaya hukum dalam membantu mencari jalan keluar dari masalah di atas sesungguhnya telah dilakukan melalui perangkat kaidah yang tertuang dalam UU Pernikahan No. 1 tahun 1974. Secara sosial kemasyarakatan, makna keluarga dalam ikatan pernikahan merupakan bentuk pergaulan hidup manusia golongan primer.

Objek dari hubungan pergaulan tersebut adalah pribadi manusianya. Oleh karena itu manusia dalam kaitan ini bukan sebagai sarana atau alat, melainkan sebagai tujuan dari pergaulan hidup manusia.

Untuk itu maka faktor manusia dalam hubungan pernikahan sungguh merupakan faktor yang paling penting.

Oleh karenanya kesiapan mental maupun fisik bagi pelaku pernikahan harus benar-benar dipersiapkan secara matang.

Memang di dalam setiap kelompok masyarakat, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat secara makro memiliki makna yang berbeda-beda.

Anggota keluarga pengrajin misalnya, sudah tentu memiliki makna sebagai satu kesatuan dari suatu proses produksi.

Sedangkan bagi lingkungan masyarakat agraris makna anggota keluarga sudah lain lagi, yakni merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam menopang tujuan hidup keluarga dalam meningkatkan hasil panen.

Tradisi menikahkan anak di bawah umur pada keluarga petani pedesaan tentu saja tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah mengakar kuat.

Mereka sangat memerlukan anggota keluarga penunjang proses pengolahan lahan

pertanian, dan satu-satunya alternatif yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka kendati pun masih di bawah umur.

Mengapa pola berpikir mereka demikian sederhana? Keadaan itu tentunya tidak lepas dari kondisi yang membentuk pola kehidupan merek yang diwarisi secara turun temurun, yang memandang proses kehidupan itu tidak lebih dari sesuatu yang bersifat rutinitas.

Terlepas dari asumsi tersebut beralasan atau tidak, yang jelas keadaan tersebut hingga kini masih berlangsung.

Ditambah pula dengan lajunya proses industrialisasi di Indonesia yang berakibat tumbuh pesatnya perekonomian masyarakat di satu pihak, namun tidak dapat dipungkiri bahwa para petani di pedesaan masih agak sulit untuk mampu menjangkau peluang lain dari adanya proses industrialisasi tersebut.

Memperhatikan beberapa faktor yang dikemukakan di atas, kiranya dapat ditelaah lebih lanjut beberapa indikator yang sekurang-kurangnya ikut mendukung tingkat kepatuhan warga masyarakat akan kaidah hukum.

Beberapa diantaranya misalnya tingkat sosial ekonomi keluarga, taraf pendidikan yang pernah dialami anggota keluarga tersebut, serta pemahaman akan norma-norma hukum yang berlaku dan juga kaidah-kaidah lain yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Adapun faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan di usia muda adalah sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Tinggi rendahnya angka pernikahan di usia muda sangat di pengaruhi oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat dalam keluarga di Gowa

Maka tidak heran bila pernikahan di usia muda biasanya terdapat di daerah pedesaan yang relatif tertinggal secara ekonomi.

Oleh karena itu, banyak orang tua yang menyarankan dan bahkan mendorong anak-anak mereka untuk cepat-cepat menikah walaupun usia anak tersebut belum cukup untuk melakukan suatu ikatan pernikahan.

Karena orang tua yang perekonomiannya yang relatif rendah tidak sanggup lagi untuk membiayai pendidikan anaknya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga banyak anak yang putus sekolah maupun tidak melanjutkan sekolah sama sekali.

“Dengan sebab adanya pernikahan di usia muda sedikit banyak akan membantu masyarakat dalam keluarga untuk mengurangi beban orang tua dalam masalah ekonomi keluarga yang terus membebani orang tua, sehingga orang tua mendorong anak-anaknya untuk menikah walaupun di usia yang masih cukup muda, agar bisa segera mandiri dan bisa mencari penghidupan yang lebih baik bersama pasangan hidupnya”.

Kalau dilihat dari segi perekonomian masyarakat muslim Gowa, termasuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, karena mayoritas masyarakatnya hanya mengandalkan pada sektor pertanian saja.

Umumnya pernikahan di usia muda ini biasa terjadi pada masyarakat yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah lebih-lebih di Kabupaten Gowa, sehingga menikah di usia muda seakan-akan menjadi sebuah solusi yang paling tepat untuk keluar dari himpitan ekonomi yang mereka hadapi.

Terutama bagi kaum perempuan, di tengah-tengah kondisi ekonomi mereka yang semakin sulit, para orang tua mereka lebih memilih mengantarkan putri mereka untuk segera melaksanakan suatu ikatan pernikahan, karena paling tidak sedikit banyak beban mereka akan berkurang.

Namun agak sedikit berbeda bagi anak laki-laki, sebab seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa peran seorang laki-laki dalam kehidupan berumah tangga sangatlah besar, sehingga bagi laki-laki minimal harus mempunyai keterampilan terlebih dahulu sebagai modal awal untuk membangun rumah tangga yang harmonis nantinya.

b. Faktor Pendidikan

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa prosentase terbanyak lulusan sekolah dalam kehidupan masyarakat Desa Gowa adalah lulusan Sekolah Dasar, ini di karenakan dalam kehidupan mereka yang masih dalam kategori pra sejahtera, sehingga bagi mayoritas pemuda Desa Gowa menikah adalah jalan alternatif untuk mengisi waktu kosongnya yaitu dengan cara menikah karena dengan cara menikah tersebut sedikit banyak sudah belajar dan mengerti tentang bagaimana caranya untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya.

“Menikah adalah sebagai jalan untuk meneruskan kehidupan mereka setelah tidak ada keinginan dan kesempatan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih tinggi, ini dimaksud juga untuk memperingan beban orang tua yang di tanggungnya, dan juga dimaksudkan untuk belajar bertanggung jawab yang direalisasikan dengan cara berkeluarga.

Sehingga tidak meneruskan sekolah menjadi faktor penting yang memicu masyarakat Desa Gowa menikah di usia muda. Kalau memang tidak punya biaya untuk sekolah mau bagaimana lagi, ya jalan terbaik menikah saja”.

Itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka, ungkapan di atas merupakan ungkapan yang sangat realistis dalam kehidupan mereka, konsep menerima dan menjalankan proses kehidupan apa adanya adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan yang mereka tempuh.

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi terhadap tatanan kehidupan dalam suatu masyarakat, semakin tinggi tingkat pendidikannya maka semakin tinggi juga harkat dan martabatnya dalam suatu lingkungan masyarakat, begitu juga dalam suatu ikatan pernikahan, itulah jalan terbaik dalam kehidupan mereka.

c. Faktor Agama

Pernikahan adalah Fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk nikah, karena nikah merupakan Gharizah Insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu pernikahan, maka ia akan mencari jalan-jalan setan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam, yaitu ke dalam lembah perzinahan.

Agama merupakan elemen terpenting dalam terjadinya suatu ikatan pernikahan di Kabupaten Gowa, karena apabila melihat data yang telah dikumpulkan oleh penulis, mayoritas masyarakat Desa Gowa adalah orang yang beragama yakni Agama Islam. Hal ini, Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk

memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan sangat besar sekali, sampai-sampai ikatan pernikahan itu ditetapkan sebanding dengan separuh Agama. Dalam artian bahwa Islam tidak membenarkan hidup membujang, karena orang yang membujang atau enggan untuk menikah baik itu laki-laki atau perempuan, maka mereka itu sebenarnya tergolong orang yang paling sengsara dalam hidupnya.

Mereka itu adalah orang yang paling tidak menikmati kebahagiaan hidup, baik kesenangan yang bersifat seksual maupun spiritual.

Mungkin mereka kaya, namun mereka miskin dari karunia Allah.

Jadi dengan jelas Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk segera menikah, karena dengan cara menikah berarti sudah mengikuti anjuran Allah dan mengikuti Sunnah Nabi, dengan cara menikah pula akan menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan dari perzinahan.

"Pernikahan di usia muda harus segera dilakukan karena kalau melihat perkembangan media elektronik saat ini semakin maju, ditambah dengan masuknya media elektronik ke pelosok Desa, seperti VCD atau DVD yang memudahkan para pemuda untuk menonton berbagai macam film agak berbau porno dan bahkan film biru yang sudah bisa dinikmati di Desa ini. Sehingga tidak ada alasan lain bagi pemuda Desa Gowa untuk segera menikah agar terhindar dari perbuatan maksiat".

d. Faktor Tradisi

Di samping pernikahan di usia muda di pengaruhi oleh faktor, ekonomi, pendidikan dan Agama, pernikahan di usia muda juga terjadi karena faktor budaya yakni adat atau tradisi yang ada di suatu komunitas masyarakat, dan penafsiran terhadap ajaran Agama yang salah.

Kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia seperti di Desa Gowa juga masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan dilakukan pada usia anak- anak atau remaja, karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang sulit untuk dihilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

Perayaan pernikahan merupakan salah satu bagian penting dalam kebudayaan atau kepercayaan yang mereka anut.

Dengan menjalani pernikahan, berarti mereka telah menjalani adat masyarakat tempat dimana

mereka hidup, dan menghargai nilai budaya setempat.

Begitu juga dalam kehidupan masyarakat Gowa, maraknya pernikahan di usia muda, juga

berkaitan erat dengan tradisi dan kebiasaan yang masih berkembang di dalam kehidupan masyarakat muslim Gowa.

“Bagi sebagian masyarakat muslim Gowa, seorang anak perempuan harus segera berkeluarga bila sudah baligh.

Karena bila seorang perempuan tetap melajang pada usia di atas 18 tahun, biasanya ia dianggap sebagai Paraben Toah yakni (perempuan yang terlambat menikah)”.

Dengan demikian pernikahan di usia muda ada baiknya untuk segera dilakukan, karena anggapan miring terhadap anak yang belum menikah masih melekat dalam kehidupan masyarakat Gowa hingga saat ini, dan bahkan orang yang terlambat menikah yaitu di atas umur dua puluh tahun akan menjadikan bahan omongan masyarakat setempat, dan bahkan bisa di anggap aib bagi keluarganya. Dan bahkan kebanyakan orang tua di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan merasa malu bila anaknya yang sudah dianggap dewasa tapi belum juga mendapatkan jodoh, karena mereka menganggap suatu hal yang bisa membuat kedudukan orang tua menjadi rendah di kalangan masyarakat yang lain. Jadi tidak heran bila orang tua merasa bahagia apabila anaknya ada orang yang melamarnya sehingga langsung menerima.

Masyarakat Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan masih sangat kuat untuk menerapkan adat dalam menjalankan ajaran Agama, semangat adat yang tumbuh kuat dalam masyarakat menjadi motivasi yang lebih dominan dalam melaksanakan kehidupan, begitu juga dalam menjalankan pernikahan unsur budaya dan adat masih sangat mendominasi, baik dalam menentukan waktu, menikah, atau dalam pelaksanaan pernikahan. Maka pernikahan di usia muda di masyarakat Kabupaten Gowa tersebut terjadi atas proses budaya dan adat yang sudah terjadi secara turun temurun. Dalam hal ini orang tua mempunyai hal untuk memilihkan jodoh untuk anaknya.

Mereka menikah memang ada yang tidak kenal sama sekali antara mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan, tapi yang menarik dari kebanyakan mereka tidak menolak dengan apa yang dipilihkan oleh orang tua, mereka menjalankan

pernikahan dengan rasa senang dan rasa tanggung jawab untuk memikul segala permasalahan yang ada dalam rumah tangga mereka. Dan apabila pemuda mencari jodohnya sendiri maka mereka harus mengajukan pilihannya pada orang tua, maka ketika orang tua setuju maka mereka harus segera menikah tanpa harus memakai proses pacaran yang lebih lama, karena kalau masih menunggu proses pacaran nantinya takut terjadi hal yang tidak diinginkan.

e. Faktor Orang Tua

Orang tua merupakan panutan setiap orang termasuk bagi masyarakat Muslim yang ada di Madura, karena di mata orang Gowa, orang tua mempunyai posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan yang lain, dan juga orang tua merupakan ikon yang harus ditaati dan dipatuhi.

Sehingga tidak heran lagi kalau banyak masyarakat Kabupaten Gowa yang melangsungkan pernikahan di usia muda karena mereka mengikuti dan juga mematuhi terhadap perintah orang tua, namun di samping itu ada kemauan juga dari diri mereka masing-masing untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Dan juga karena semakin maraknya seks bebas di kalangan remaja dan muda, maupun meningkatnya angka aborsi setidaknya menjadi Indikator tingkat pergaulan bebas sudah berada pada tahap mengkhawatirkan dan harus segera dipikirkan solusinya. Salah satu jalan walaupun bukan yang mutlak adalah menikahkan pasangan remaja di usia dini.

Artinya, bagi mereka yang telah mantap dengan pasangannya, dianjurkan untuk segera meresmikannya dalam sebuah ikatan pernikahan.

Sekalipun keduanya masih menempuh pendidikan atau di bawah usia ideal.

Hal ini untuk menghindari dampak buruk dari hubungan pemuda dengan lawan jenisnya, namun ada juga penyebab terjadinya pernikahan di usia muda karena terpaksa.

Hal itu terjadi pada orang tua yang masih belum paham pentingnya pendidikan. Para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah, hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau bahkan belum lulus.

Orang tua menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting, bagi kebanyakan masyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup lebih-lebih pada perempuan di dalam kehidupan masyarakat Gowa tersebut.

A. Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Pernikahan di Usia Muda Pemuda merupakan suatu perangkat yang bisa menciptakan suatu tatanan dalam kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya masyarakat terdiri dari berbagai etnis, kelompok, dan aturan, belum tentu juga aturan setiap pemuda di dalam kehidupan masyarakat itu sama atau memiliki norma yang sejalan, terkadang juga masyarakat yang satu membolehkan pemuda untuk berbuat sesuatu dan ada juga masyarakat yang tidak membolehkannya.

Sehingga antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya harus saling

membantu dan bekerja agar tercipta suatu masyarakat yang sejahtera.

Masalah pernikahan di usia adalah isu kontemporer, dan juga pernikahan di usia muda ini bagaikan gunung es yang hanya kelihatan puncaknya saja, kemudian akhir-akhir ini isu tersebut muncul kembali dengan adanya kasus pernikahan

Syekh Puji dengan seorang gadis belia yaitu Lutfiana Ulfah yang hingga saat ini masih dalam tahap penyelesaian.

Dengan adanya kasus pernikahan di usia muda tersebut akan menimbulkan kontroversi yang berkepanjangan yakni ada yang mendukung terhadap pernikahan di usia muda seperti yang dikatakan oleh Rosidah, ia mengatakan bahwa : “Pernikahan di usia muda sah-sah saja dilakukan oleh semua masyarakat Muslim khususnya masyarakat Muslim Madura dan juga tergantung situasi dan kondisinya, pernikahan di usia muda akan menjadi baik dilakukan apabila sudah siap dan sudah mampu untuk melakukan pernikahan tersebut di samping mendesaknya akan kebutuhan biologis demi menjaga perilaku agar tidak terjerumus kepada jalan yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam yakni perzinahan, dan juga pernikahan tersebut bisa menjadi tidak baik ketika tidak siap untuk melangsungkan pernikahan tersebut sehingga akan menimbulkan berakhirnya suatu ikatan pernikahan tersebut”.

Maka dari itu pernikahan di usia muda bukanlah suatu anjuran Syariat Islam akan tetapi merupakan suatu hal yang boleh-boleh saja dilakukan oleh setiap pemuda asalkan sudah siap dan berani untuk bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya. Hal tersebut juga mendapat respon yang positif oleh Lora Ahmad dan Suhadi sebagaimana telah disebutkan pada keterangan sebelumnya.

Dia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda harus segera dilakukan karena perkembangan media elektronik saat ini semakin maju, yang mendorong para

pemuda untuk segera melakukan pernikahan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti perzinahan dan lain-lain.

Namun ada juga orang yang menganggap bahwa pernikahan di usia muda akan menimbulkan dampak negatif ketika tidak dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh untuk melakukan pernikahan : “Pernikahan di usia muda akan membawa dampak negatif bagi kehidupan kedua belah pasangan, apabila ketika mereka memasuki kehidupan berumah tangga tidak dibekali dengan kesiapan, dan niat untuk ibadah dan mendapat ridha oleh Allah. Karena dengan pengalaman dan niat yang tulus mereka dapat membangun suatu fondasi untuk gerakan mereka, hubungan mereka, dan proses kesempurnaan di antara mereka, sehingga pernikahan tersebut dilakukan dengan niat yang tulus maka jarang sekali yang menimbulkan problem yang mengakibatkan pada terjadinya perceraian bagi kedua pasangan tersebut.

Maka dari itu suatu celah yang dapat ditutup melalui permintaan bantuan dari pihak keluarga untuk mengarahkan mereka dan mengawasi gerak-gerik mereka dalam kehidupannya, walaupun pernikahan di usia muda banyak faktor negatifnya namun ada juga faktor positifnya yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan di usia muda yaitu menghindari perbuatan maksiat, menjaga pandangan mata dan lain-lain.”.

Namun, dari berbagai asumsi tersebut di atas mayoritas dari masyarakat muslim Desa bajur tersebut menganggap pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupannya merupakan suatu hal yang positif dan boleh-boleh saja dilakukan, asalkan dilandasi dengan niat yang sungguh-sungguh dan hanya ingin

mendapatkan ridha dari Allah semata. Karena apabila melihat kehidupan masyarakat saat ini semakin memperlihatkan, jadi pernikahan di usia muda menjadi solusi yang terbaik bagi kehidupan masyarakat muslim Madura pada umumnya.

Pernikahan di usia muda bukanlah perampasan hak terhadap anak, malahan pernikahan merupakan suatu peralihan perwalian dari seorang ayah (orang tua) terhadap seorang suami.

“Orang tua hanya saja menyerahkan tanggung jawab untuk mengasihi, melindungi, menafkahi, mendidik, dan memberikan semua hak anak perempuannya kepada laki-laki yang orang tua tersebut di percayai mampu untuk memenuhi segala kebutuhan istrinya, dan mampu memikul tanggung jawab tersebut yang telah dilimpahkan orang tua terhadap suami tersebut. Dalam pandangan hukum Islam membolehkan menikahkan anak yang sudah baligh atau belum baligh,

akan tapi sudah tamyiz yakni sudah bisa menyatakan niatnya”.

Seorang anak yang memasuki pernikahan sesuai dengan syariat Islam tetap terpenuhi hak-haknya. Anak yang belum baligh belum dituntut untuk melakukan suatu ikatan pernikahan, namun harus dipersiapkan untuk mampu melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang istri, karena sebagai

seorang wanita pasti akan melaksanakan yang namanya pernikahan tersebut karena sudah digariskan oleh Tuhan sejak masih dalam kandungan ibunya.

Sementara yang sudah baligh mendapatkan hak sekaligus sudah harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri.

Telah kita ketahui bersama bahwa pernikahan di usia muda atau di bawah umur akan memberikan dampak kepada kelanjutan dari kehidupan keluarganya di masa yang akan datang. Dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan pada usia muda ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu dampak

positif yang akan menunjang terhadap kehidupan selanjutnya dalam pernikahan, dan dampak negatif yang merupakan akibat buruk yang ditimbulkan oleh pernikahan pada usia muda tersebut. Adapun kedua dampak tersebut dapat dijelaskan dengan rinci yakni sebagai berikut :

1. Dampak Positif yang di Harapkan dari Pernikahan di Usia Muda :

- a. Dapat meringankan beban hidup salah satu belah pihak atau kedua belah pihak. Yaitu dimaksudkan nantinya dengan terjadinya pernikahan di usia muda, anak mereka hidup dan kehidupan mereka untuk selanjutnya tidak akan terlantar. bisa jadi anak perempuan di bawah tanggung jawab pihak laki-laki sehingga bebas ekonomi keluarga agak berkurang atau setidaknya tidaknya mendapatkan seorang menentu yang kaya atau besan yang kaya. sehingga dengan demikian dapat membantu beban yang tidak punya tersebut (kehidupan ekonomi yang kurang stabil), atau dengan kata lain dengan pernikahan tersebut maka jumlah anggota yang akan menanggung perekonomian keluarga tersebut bertambah.
- b. Terhindar dari bahan gunjingan masyarakat karena anaknya tidak termasuk perawan atau perjaka tua. Karena dalam kehidupan masyarakat yang ada di Desa Bajur yang kehidupan sehari-harinya dipenuhi dengan kegiatan dan kesibukan dalam masalah pertanian untuk memenuhi

kebutuhan hidup dan keluarga mereka, semua itu sangat mempengaruhi kematangan jiwa anak-anak mereka. Jika dilihat dari tingkat pendidikan secara gradual. memang pendidikan yang mereka raih kurang begitu lengkap dalam arti kebanyakan dari mereka hanya lulusan SD.

Bertolak dari hal ini maka kecenderungan bagi orang tua mereka untuk mengawinkan anaknya secepatnya, karena asumsi mereka semakin tua anak perempuan maka semakin banyak gunjingan- gunjingan. dan ini mungkin sangat tepat karena mereka bekerja dalam sehari-harinya selalu bersama-sama atau beramai-ramai. Dalam pekerjaan bersama-sama ini mereka saling mengunjingkan anak-anak remaja baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan orang tua yang mengawinkan anaknya secepatnya, takut jangan-jangan anaknya menjadi bahan gunjingan mereka. Sasaran mereka yang sangat empuk adalah anak-anak muda yang belum menikah. golongan-golongan remaja yang belum kawin inilah yang mereka anggap perawan tua atau perjaka tua.

- c. Telah menjalankan salah satu Sunnah Rasulullah SAW. Ini merupakan suatu hal yang sangat terpuji apabila kita sebagai umatnya mengikuti Sunnahnya, dalam kontek ini yaitu mengikuti perbuatan yang beliau lakukan, yaitu pernikahan, karena siapapun yang tidak mengikuti Sunnahnya tidak termasuk golongannya. Hal inilah yang memberikan motivasi terhadap mereka untuk melakukan pernikahan bagi para pemuda ataupun pemuda yang ada di Desa Bajur dan bahkan bisa memotivasi orang tua untuk segera menikahkan anaknya.

- d. Membentengi pemuda atau pemudi dari penyimpangan, karena pernikahan tersebut dapat mewujudkan bagi mereka kesempatan untuk memuaskan kebutuhan seksual, yang mana dorongannya akan menciptakan khususnya pada masa remaja (pubertas) bahaya nyata atas kepolosan mereka berdua.
 - e. Pembentukan keluarga; hal yang menuntut adanya kesadaran akan kehidupan berumah tangga bagi suami-istri dan tanggung jawab berupa hak-hak dan kewajiban- kewajiban timbal-balik, baik antara suami dan istri, atau antara mereka dengan anak-anak mereka. Sebagaimana ia (pembentukan keluarga) juga menuntut adanya pengetahuan tentang cara mengurus lembaga ini (keluarga) dan menertibkan serta mengatur urusan-urusannya, keadaannya, dan berbagai kebutuhan-kebutuhannya.
- Karena itu, ketika Islam menganjurkan pernikahan sedini mungkin, maka ia telah menjaga sisi yang pertama.

Yakni, Islam melindungi manusia dari penyimpangan yang terkadang timbul karena reaksi gejala kebutuhan naluri seksual, dan ia mengarahkan pemuasan nalur tersebut melalui jalan yang alami dan sah (syar'i). Islam menjaga kedua pasangan (pemuda-pemudi) dari keterperosokan ke dalam cara-cara yang ekstrem, yang akan memunculkan pelbagai problem psikologis dan praktis dalam kehidupan manusia, di antaranya dengan melakukan tindakan penyimpangan dari tabiat manusia dan menjungkir balikkannya melalui cara mencekiknya dan menguburnya.

2. Dampak Negatif yang Perlu Diperhatikan dari Pernikahan di Usia Muda :

- a. Dampak biologis, Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, kanker leher rahim, neoritis depresi, perobekan yang luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa anak dan ibunya dan adanya konflik yang berujung pisah rumah bahkan bisa saja berujung pada perceraian.
- b. Dampak psikologis, secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada pernikahan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.
- c. Dampak sosial, fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran Agama apapun termasuk Agama Islam yang sangat menghormati perempuan Rahmatan Lil Alamin. Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya

patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan

C. Perkawinan Dini ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam khususnya yang diatur dalam Ilmu Fiqih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim. Perkawinan yang merupakan perbuatan mulia tersebut pada prinsipnya, dimaksudkan untuk menjalin ikatan lahir batin yang sifatnya abadi dan bukan hanya untuk sementara waktu, yang kemudian diputuskan lagi. Atas dasar sifat ikatan perkawinan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Buku I tentang Hukum Perkawinan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah dirumuskan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miltsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu Pasal 3 juga diatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan *nakaha* dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat (Al-

Baqi 1987: 332-333 dan 718). Yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad) perkawinan.

Islam telah memberikan keluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan (*al-ba'ah*) untuk melangsungkan perkawinan dan tidak menunda-nunda pernikahan bagi yang sudah mampu, yang akan dapat menghantarkan kepada perbuatan haram. Dalam sebuah hadistnya, Rasulullah s.a.w bersabda : “*Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah untuk kawin maka kawinlah karena hal itu akan menjadi obat dan menahan pandangan...*”

Dalam hadist tersebut ada persyaratan untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu kesanggupan. Kesanggupan dapat berupa kesanggupan fisik dan mental. Jika dikaitkan dengan perkawinan anak dibawah umur, jelas persyaratan tersebut belum dimiliki oleh anak yang masih dibawah umur. Di dalam Islam memang tidak ada ketentuan batas umur minimal untuk perkawinan. Yang disyaratkan adalah baligh atau dewasa, karena kedewasaan tidak sama diantara satu anak dengan yang lainnya, maka batas umur tersebut menjadi elastis.

Masalah penentuan batas umur di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum di Indonesia memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai upaya pembaharuan pemikiran fikih masa lampau. Akan tetapi, jika dilacak, referensi *syar'inya* mempunyai landasan kuat.

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjuk bahwa perkawinan anak di bawah umur akan meninggalkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan dari berbagai pihak, rendahnya usia perkawinan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak

sejalan dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan tersebut akan sulit terwujud jika masing-masing pasangan belum matang (dewasa) fisik dan mentalnya. Kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang terjadi di dalam keluarga. Banyak kasus menunjukkan hal tersebut. Umpamanya di Pengadilan Agama di Jawa Tengah menunjukkan bahwa banyaknya perceraian cenderung di dominasi akibat perkawinan di usia muda.

Masalah kematangan fisik dan mental seseorang dalam konsep Islam lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat dilihat dalam pembebanan (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam term teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum). Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh imam yang empat, Rasulullah bersabda : “*Terangkat qalam (pertanggungjawaban) seseorang dari tiga hal : orang yang tidur hingga bangun, orang gila hingga sembuh, dan anak-anak hingga ia bermimpi dan mengeluarkan mani (ihtilam)*.”

Menurut hadist diatas, kedewasaan seorang anak laki-laki ditandai dengan bermimpi (*ihtilam*). Jika dikaitkan dengan perkawinan, seorang anak laki-laki sudah mengalami mimpi basah berarti sudah boleh melangsungkan perkawinan. Akan tetapi, persoalannya tentunya tidak segampang itu.

Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak sebelum usia baligh. Menurutnya, nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dapat melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan

pokok perkawinan. Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks, dan memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis dan kultural yang ada, sehingga dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad s.a.w dengan Aisyah (yang saat itu berusia 9 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi s.a.w yang tidak bisa ditiru umatnya.

Kelompok pendapat ini juga mengambil dalil sejarah bahwa Aisyah dinikahi Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan bahwa pembolehan perkawinan dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Menguatkan pendapat ini, Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadist dalam kamus hadisnya. hadist pertama adalah “ Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kaffah.”

Hadist kedua berbunyi. “ *Dalam kitab Taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya*”.

Menurut mereka, perkawinan dibawah umur pada hakekatnya juga mempunyai sisi positif. Hal ini mengamati model pergaulan remaja saat ini yang acap kali tidak mengidahkan model pergaulan remaja saat ini yang acap kali tidak

mengidahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, akibatnya kerap menimbulkan bahwa kualitas moral dalam masyarakat sudah samapi pada taraf yang memprihatikan. Dalam hal ini, pernikahan dini merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut daripada terjerumus dalam pergaulan yang mengkhawatirkan.

Substansi Hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia pada manusia kini dan masa depan. Hukum Islam bersifat humanis dan selalu membawa rahmat bagi semesta alam. Apa yang pernah digaungkan Imam Al-Syatiby dalam magnum opusnya ini harus senantiasa kita perhatikan. Hal ini bertujuan agar Hukum Isam tetap selalu *up to date*, relevab dan mampu merespn dinamika perkemabangan zaman.

Permasalahannya adalah baik kebijakan pemerintah maupun hukum agama sama-sama mengandung unsur maslahat. Pemerintah melarang perkawinan anak dibawah umur dengan berbagai pertimbangan. Begitu pula agama tidak membatasi usia perkawinan secara tegas, yang ternyata juga mempunyai nilai positif. Menyikapi masalah tersebut, Izzudin Ibnu Abdusallam dalam bukunya kemaslahatan, maka dituntut untuk menakar mana maslahat yang lebih utama dilaksanakan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan

mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk *kemaslahatan keluarga dan rumah tangga*.

Kenyataan di lapangan menunjukkan, bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian. Di samping itu, ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia.

Hukum Islam secara umum meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Antara agama dan negara terjadi perselisihan dalam memaknai perkawinan dibawah umur. Perkawinan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-Undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah perkawinan dibawah umur menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, perkawinan dibawah umur ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum *baligh*.

Terlepas dari semua itu, masalah perkawinan dibawah umur adalah isu-isu kuno yang sempat tertutup oleh tumpukan lembaran sejarah. Dan kini, isu tersebut kembali muncul ke permukaan. Hal ini tampak dari betapa dahsyatnya benturan ide yang terjadi antara para sarjana Islam klasik dalam merespons kasus tersebut.

Pendapat yang digawangi Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang perkawinan dibawah umur (pernikahan sebelum usia *baligh*). Menurutny, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.

Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan perkawinan di bawah umur. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula perkawinan di bawah umur merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh

diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/*kafaah*”.

Hadis Nabi kedua berbunyi, ”Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya”.

Pada hakekatnya, perkawinan dibawah umur juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi acapkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan nya sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Perkawinan dibawah umur juga merupakan upaya untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif tersebut. Daripada terjerumus dalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan, jika sudah ada yang siap untuk bertanggungjawab dan hal itu legal dalam pandangan syara’

Walaupun seperti yang disebutkan diatas, bahwa dalam satu sisi perkawinan dibawah umur ada positifnya namun kenyataannya perkawinan dibawah umur lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.

Hukum Islam, dalam hal ini Al Qur`an dan hadits memang tidak ada menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah *baligh*, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuannya untuk menikah. Pasal 16 KHI menyebutkan bahwa : Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai

wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

- **Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Di Indonesia**

Berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. UU ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan, menurut Pasal 6 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 : perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 : untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua, Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 : perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan menurut negara pembatasan umur minimal untuk kawin bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat dihindari, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin.

Selain itu juga Berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 mencegah adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu dimana dalam Pasal 1 tentang perlindungan

anak, definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam Pasal 4 UU No. 23 tahun 2002 : setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, Pasal 9 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 : Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, Pasal 11 UU No.23 Tahun 2002: setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, Pasal 13 ayat 1 UU No.23 Tahun 2002 : setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- (a) diskriminasi
- (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- (c) penelantaran
- (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- (e) ketidakadilan
- (f) perlakuan salah lainnya.

Selain itu orang tua dan keluarganya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak seperti yang tertulis di Pasal 26 ayat 1 UU no. 23 tahun 2002 : orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- (d) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

D. PRAKTEK PERNIKAHAN DI KABUPATEN GOWA SEBELUM BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1974

Hukum Perkawinan sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974 di Indonesia Sebelum adanya Undang-Undang No.1 tahun 1974 di Indonesia berlaku hukum perkawinan bagi berbagai golongan suku bangsa diberbagai daerah. Hal ini diatur dalam penjelasan umum nomor 2 dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Penggolongan penduduk diatur dalam Indische Staat Regeling yaitu peraturan ketatanegaraan Hindia pasal 163, dimana penduduk dibagi menjadi tiga golongan yaitu : golongan eropa, golongan pribumi dan golongan timur asing. 46 Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bagi berbagai golongan penduduk di berbagai daerah adalah seperti berikut : 47

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipiir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S.1933 No.74)

- d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dinamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional, yaitu yang berlaku bagi setiap warga negara RI, ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan “ Bhineka Tunggal Ika” yang dicantumkan dalam lambang negara RI, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan Yang Maha Esa.

Dari peraturan inilah lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.

Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang ini disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Sehubungan dengan berlakunya ketentuan baru tentang Hukum Perkawinan ini yang secara resmi menghapuskan berlakunya semua ketentuan tentang Perkawinan yang ada sebelumnya, namun pasal 66 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menentukan sebagai berikut :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijke Ordonantie Christen Indonesia 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijke Stbl 1898 No.158) dan peraturan-peraturan lainyang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dieksplorasi pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pernikahan di usia muda yang terjadi dalam kehidupan masyarakat muslim di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor agama, faktor tradisi dan faktor orang tua, dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri yang berkeinginan untuk menikah.
- b. Masyarakat muslim di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya memandang pernikahan di usia muda dengan pandangan yang positif, yaitu dalam artian pernikahan di usia muda memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan masyarakat Madura, khususnya para pemuda Gowa tersebut, yaitu akan terhindar dari berbagai hal yang akan menjerumuskan pemuda ke dalam jurang kemaksiatan seperti perzinahan dan lain-lain.
- c. Pernikahan di usia muda tampaknya sudah menjadi suatu tradisi bagi masyarakat muslim di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

B. SARAN-SARAN

C. Untuk menimalisir terjadinya pernikahan di usia muda, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka seharusnya dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang hal ini harus dimulai oleh peranan orang tua sebagai orang yang terpenting dalam pergaulan dan perkembangan anak.
- b. Perlu adanya peran aktif para kiai dalam menumbuhkan semangat pendidikan baik kepada generasi muda maupun pada orang tua, agar orang tua selalu memberikan motivasi kepada anaknya bahwa betapa pentingnya pendidikan pengembangan diri. Di sini juga diperlukan keseriusan para kiai untuk menampung semua permasalahan yang setiap kali muncul permasalahan dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa lega dan tenang apabila punya tempat untuk memecahkan permasalahannya. Peran aktif dan keseriusan para kiai ini merupakan kekuatan besar untuk menanggulangi praktek pernikahan di bawah umur karena masyarakat memandang bahwa sosok kiai merupakan sosok yang suci berwibawa serta orang banyak paham tentang Agama.
- c. Perlu adanya sosialisasi UU No 1/1974 pada semua masyarakat Madura agar mereka punya kesadaran hukum dan tidak terkungkung oleh hukum adat yang masih di anut. Sosialisasi ini sebaiknya dilakukan oleh para pejabat pemerintah desa maupun pejabat yang berwenang.